





## PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Mei 2018/Khusus - Akhir Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)

UNIT KERJA : BPS PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SUB UNIT KERJA : BPS KABUPATEN/KOTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YUDI WAHYUDIN

2. Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BPS KOTA SAMARINDA

3. NHK : 459030

## II. DATA HARTA

Α.	TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	290.000.000
	.1 .1 .1		

1. Tanah Selua<mark>s</mark> 200 m2 di <mark>K</mark>AB / KOTA <mark>K</mark>OTA SAMA<mark>RI</mark>NDA , HAS<mark>IL</mark>

SENDIRI Rp. 12.000.000

2. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL

SENDIRI Rp. 28.000.000

3. Tanah dan Bangunan Seluas 152 m2/110 m2 di KAB / KOTA KOTA

SAMARINDA, HIBAH TANPA AKTA Rp. 250.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 7.000.000

1. MOTOR, HONDA NC11B3CA/T Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp.

7.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	13.600.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	10
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	110.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	Chic Kall
Sub Total	Rp.	420.600.000
III. HUTANG	Rp.	13.131 <mark>.05</mark> 2
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	407.468.948

Catatan:





- 1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari <a href="elhkpn.kpk.go.id">elhkpn.kpk.go.id</a>. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui <a href="elhkpn.kpk.go.id">elhkpn.kpk.go.id</a>, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- 3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **28 November 2018**.
- 4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

